

PENGANTAR KATA

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2018 dapat dirampungkan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj KPU Provinsi Gorontalo disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan Kinerja KPU provinsi Gorontalo adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan output selang tahun anggaran 2018, sehingga diharapkan kinerja KPU Provinsi Gorontalo dapat terukur dan terevaluasi keberhasilan maupun kekurangan baik secara kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan hingga manfaat yang dirasakan oleh publik.

Disadari bahwa, LKj KPU Provinsi Gorontalo masih memiliki kekurangan dan membutuhkan masukan dari berbagai pihak, dengan komitmen untuk menjadi lebih baik di masa mendatang dalam mewujudkan visi KPU Provinsi Gorontalo, menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Gorontalo, Januari 2019


KETUA,
FADLYANTO KOEM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2018 KPU Provinsi Gorontalo menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 serta menyelenggarakan pemilihan kepala daerah Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo tahun 2018.

Sebagai lembaga yang mengelola anggaran negara, KPU Provinsi Gorontalo menyusun Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Gorontalo yang transparan dan akuntabilitas terhadap kinerja dan anggaran selang tahun 2018. Dalam LKj memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU RI, 3 (tiga) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja. Hal tersebut dievaluasi dan dianalisis capaian kinerja dapat dikatakan 100% kinerja dan 94,47% pencapaian realisasi anggaran. Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Gorontalo kepada publik.

Keberhasilan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di tahun 2018 merupakan kerja keras kita semuanya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, Pemerintah daerah dan koordinasi stakeholder pemilu serta partisipasi masyarakat Gorontalo. Tentunya dalam proses pelaksanaannya banyak kendala yang dihadapi, dari faktor internal kelembagaan maupun luar lembaga KPU Provinsi Gorontalo. Akan tetapi dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki mampu diselesaikan dengan baik. Penguatan internal kelembagaan, bimtek dan

evaluasi senantiasa dilakukan sebagai langkah meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Disamping itu, upaya keras kinerja penyelenggara KPU Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 terlihat dari keberhasilan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, hal ini merupakan kesuksesan kita bersama yang harus kita pertahankan dan lebih baik lagi pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 - 2019	13
B. RENCANA KINERJA KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018	20
C. PERJANJIAN KINERJA KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KPU PROVINSI GORONTALO	24
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KPU PROVINSI .	27
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN KPU PROVINSI GORONTALO	50
BAB IV PENUTUP	57

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KINERJA KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN
2018

LAMPIRAN 2 : PENGUKURAN KINERJA KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN
2018

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahunan 2018	21
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2018	22
Tabel 2.3	Revisi Pagu Anggaran KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018	23
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2018 ..	24
Tabel 2.5	Indikator Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2018	26
Tabel 2.6	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU Provinsi Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku pada tahun 2015-2019	30
Tabel 2.7	Pengukuran Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan pada tahun 2015-2019	32
Tabel 2.8	Partisipasi Pemilu dan Pilkada KPU Provinsi Gorontalo	33
Tabel 2.9	Pengukuran Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan pada tahun 2015-2018	35
Tabel 2.10	Partisipasi Pemilih disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan serentak pada tahun 2018 Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo	36

Tabel 2.11	Pengukuran Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan pada tahun 2015-2018	37
Tabel 2.12	Pengukuran Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Terhadap Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan pada tahun 2015-2018	39
Tabel 2.14	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU Provinsi Gorontalo, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik pada tahun 2015-2019	42
Tabel 2.15	Pengukuran Kinerja Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan pada Tahun 2015-2019	44
Tabel 2.16	Jumlah kasus yang dimenangkan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2018	46
Tabel 2.17	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo pada tahun 2015-2019	47
Tabel 2.18	Pengukuran Kinerja Terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2015-2019	50
Tabel 2.19	Pengukuran Kinerja Terhadap Reviu Laporan Keuangan pada tahun 2015-2019	51
Tabel 2.20	Realisasi APBN Murni KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018	52

Tabel 2.21	Perbandingan Pagu dan Realisasi APBN Murni dan Hibah APBD Tahun Anggaran 2015-2018 KPU Provinsi Gorontalo ...	53
Tabel 2.22	Pengukuran Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran 2018.....	54

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Masa Jabatan 2018 - 2023	6
Grafik 1.2	Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.....	9
Grafik 1.3	Data Golongan dan Kepangkatan KPU Provinsi Gorontalo	11
Grafik 1.4	Jenjang Pendidikan Pegawai Tahun 2018	11
Grafik 1.5	Persentase Pegawai Tahun 2018	12

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang masih eksis dan berkembang mengikuti laju perubahan dunia dengan berbagai kemajuan dari semua dimensi kehidupan. Selain itu, Indonesia mempunyai keunikan tersendiri dibanding negara lain. Sebut saja, Indonesia memiliki suku, bahasa, budaya, agama yang berbeda bahkan dipisahkan dengan letak kepulauan antar pulau dari Sabang sampai Marauke dari pulau Rote sampai Miangas, Namun, memiliki satu semangat dan konsensus bersama yaitu ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara kesatuan republik Indonesia yang menjadi dasar dan falsafah seluruh warga negara dalam menjalankan cita-cita proklamasi Indonesia tercinta. Sebagai negara yang besar Indonesia mampu menjalankan negara yang demokratis dengan pergantian penyelenggara negara melalui Pemilihan Umum. pilihan utama Pemilu merupakan cara konstitusi, aman dan tertib tertentu akan memberikan kebebasan dan hak yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara.

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap

warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Secara umum bahwa setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah aturan yang ada senantiasa berubah dipengaruhi oleh Undang-undang tentang kepemiluan, sehingga hal tersebut dapat mengakomodir hal-hal yang berhubungan dengan dinamisnya perkembangan demokrasi secara nasional maupun lokal dan perbaikan sistem kepemiluan. Di pihak lain, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan Umum memberi warna tersendiri terhadap penguatan kelembagaan demokrasi baik dari dimensi infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Kedewasaan berpolitik membawa searah dengan kemajuan demokratisasi sebagai ciri masyarakat yang beradab, yang menghormati nilai-nilai kebebasan penghargaan terhadap perbedaan memberikan pendapat, kebebasan memberikan informasi dan menjamin hak-hak konstitusi warga negara.

Pada ruang lain, salah satu tantangan dalam pemilu adalah maraknya praktek politik uang (*money politic*) yang berlangsung hampir di seluruh tingkatan pemilihan umum. Bahwa politik uang adalah salah satu faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi, politik uang ini merupakan mata rantai dari terbentuknya kartel politik. Demokrasi perwakilan yang mengandalkan votes

(suara) dengan mudah diubah menjadi sebuah komoditas, yang akan dijual pada saat sudah diperoleh dan dibeli saat belum diperoleh. Dibeli waktu pemilihan umum dengan segala teknik dan dijual pula dengan segala teknik.

Oleh sebab itu, melalui visi misi dan program KPU sampai tingkat bawah berupaya mewujudkan pemiliu yang berintegritas, yang bebas dari politik uang, kekerasan dan ketidak adilan melalui laporan kinerja ini KPU Provinsi Gorontalo bersama KPU kabupaten/kota mempertanggung jawabkan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2018.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. KPU Provinsi Gorontalo bersifat tetap, mandiri dan hirarki dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diatur dalam undang serta berperan sebagai koordinator dan fasilitator bagi KPU Kabupaten / Kota diwilayah Gorontalo.

2. Tugas dan fungsi

Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur Tugas KPU Provinsi dalam Pemilihan Umum disebutkan bahwa tugas sebagaimana pasal 15 sebagai berikut:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;

- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Organisasi KPU Provinsi Gorontalo

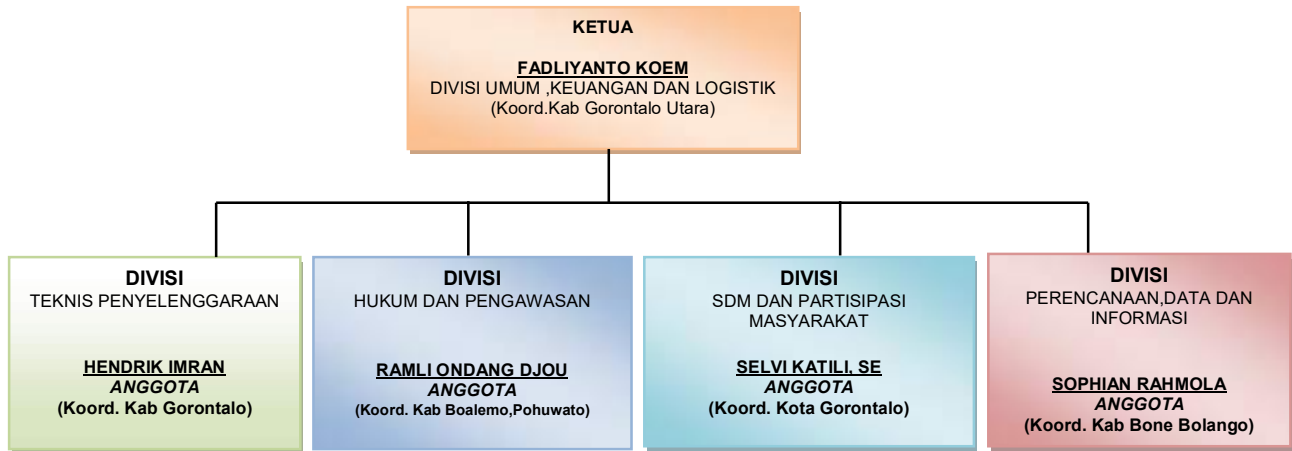
Dalam sebuah lembaga organisasi yang bersifat tetap, memiliki struktur yang bertujuan untuk membagi tugas dan fungsi yang membagi habis tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing individu dalam struktur, yang bersifat koordinasi, vertikal dan horisontal.



Pada tataran pengambilan keputusan atau kebijakan Ketua dan Anggota mempunyai hak suara yang sama atau diputuskan bersama sama (kolektif kolegal). Untuk organisasi KPU Provinsi Gorontalo telah dibentuk Divisi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 146/Ort.02-Kpt/75/Prof/X/2018 tentang Pembagian Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KPU Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

GRAFIK 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
MASA JABATAN 2018-2023**



Untuk menjabarkan tugas divisi dalam struktur organisasi Anggota KPU Provinsi Gorontalo 2018-2023, telah disusun tugas masing-masing Divisi sebagai berikut:

1. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik

Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Administrasi perkantoran;
- b. Kearsipan;
- c. Protokol dan persidangan;
- d. Pengelolaan dan pelaporan Badan Milik Negara;
- e. Kerumah tanggaan kantor;
- f. Keamanan;
- g. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaporan keuangan;
- h. Logistik;
- i. Pengadaan barang dan jasa.

2. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Divisi Teknis mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
- d. Penggantian antar waktu anggota DPRD dan DPD.

3. Divisi Hukum dan Pengawasan

Divisi hukum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembuatan rancangan Keputusan;
- b. Verifikasi Partai Politik;
- c. Verifikasi Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Pelaporan Dana Kampanye;
- e. Telaah Hukum;
- f. Advokasi Hukum;
- g. Sengketa Pemilu;
- h. Dokumentasi Hukum;
- i. Pengawasan/Pengendalian Internal.

4. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat

Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

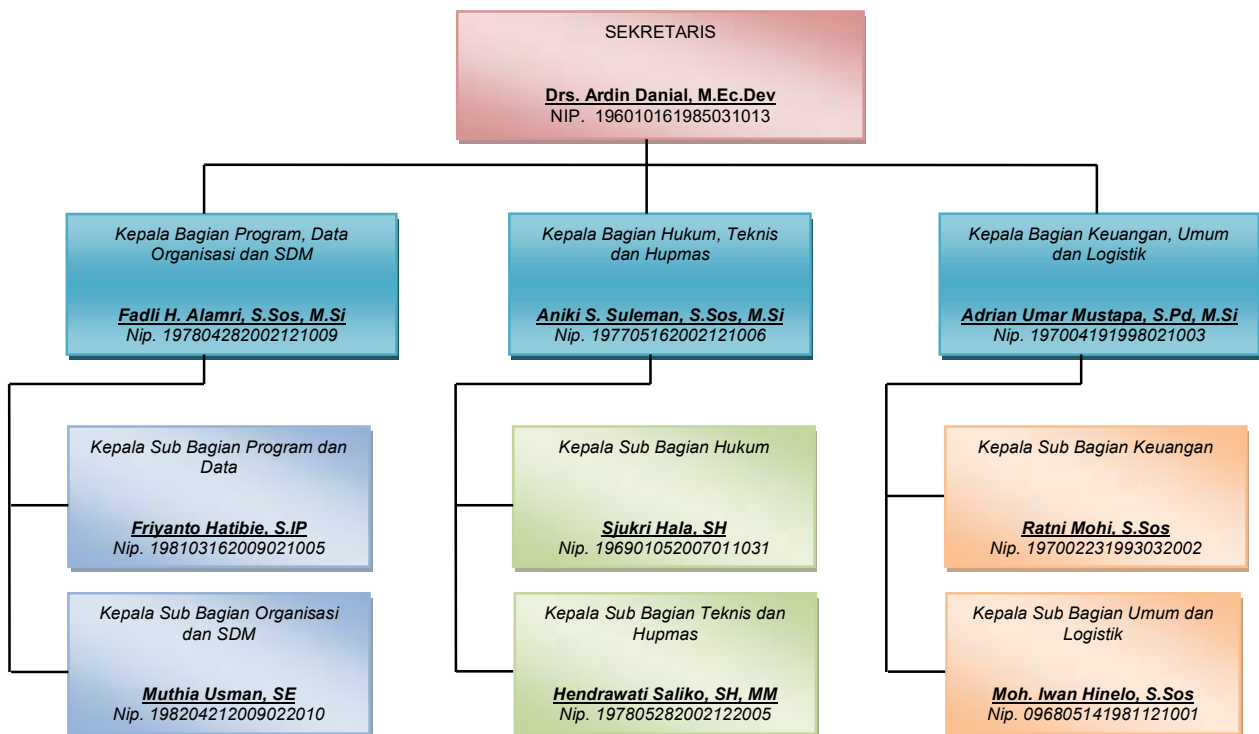
- a. Rekrutmen anggota KPU dan badan Adhoc;
- b. Diklat dan pengembangan SDM;
- c. Pengembangan Budaya kerja organisasi;

- d. Penegakan disiplin organisasi;
 - e. Kampanye;
 - f. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
 - g. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - h. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
5. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
- Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Pemutakhiran Data Pemilih;
 - c. Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan;
 - d. Pengelolaan jaringan IT;
 - e. Scan hasil Pemilu;
 - f. Pelaporan dan Evaluasi.

2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo

Adapun struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

GRAFIK 1.2
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2018



3. Sumber Daya Manusia

Penyelenggara Pemilu selang tahun 2016 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengalami penurunan kuantitas (jumlah) dipengaruhi oleh pemetaan dan analisis jabatan masing masing Aparatur Sipil Negara yang bekerja di masing-masing satuan kerja, sesuai dengan surat edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 05 tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal pemetaan pegawai pada sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. surat tersebut menyamaratakan Aparatur sipil negara setiap Sekretariat KPU Provinsi maksimal berjumlah 35 orang dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebanyak 17 orang, sehingga masing masing ASN diharapkan mampu atau serba bisa dalam melaksanakan tugas kepiluan dan kedinasan.

Peningkatan Sumber daya manusia baik Adhoc penyelenggara Pemilu maupun Sekretariat yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR RI, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 dilakukan pembenahan melalui berbagai kegiatan supervisi, monitoring, pelatihan dan bimbingan teknis dalam pengembangan SDM dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu, khususnya pada jajaran kesekretariatan mengisi beberapa jabatan struktural yang dimutasikan atau mengalami pergeseran dari



instansi induk (Pemerintah Daerah) dengan mempertimbangkan kemampuan aparatur negara yang disesuaikan dengan Peraturan yang ada.

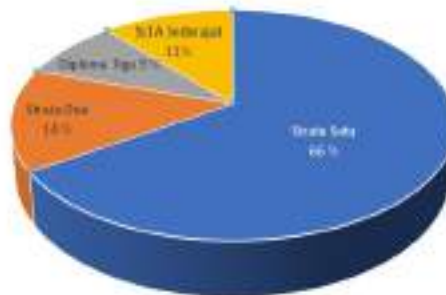
Adapun komposisi SDM di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

Grafik 1.3
Data Golongan dan Kepangkatan KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2018



Komposisi aparatur sipil negara yang bekerja di Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo memiliki beragam disiplin ilmu dan jenjang pendidikan seperti grafik dibawah ini:

Grafik 1.4
Jenjang Pendidikan Pegawai Tahun 2018



Jenis kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang ada di KPU Provinsi Gorontalo terdiri dari pegawai negeri sipil KPU yang diangkat dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI (pegawai organik) dan aparatur sipil negara yang berasal dari Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan / diperbantukan di Intansi KPU. Adapun persentase sebagaimana grafik dibawah ini

Grafik 1.5
Persentase Pegawai Tahun 2018



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 - 2019



KPU Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari satuan kerja perangkat pusat yang ada di daerah membuat rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Strategi yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Renstra KPU Provinsi Gorontalo memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) yang ada di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 160/Kpts/KPU Prov-027/Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 2015-2019.

Adapun visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Visi

Adapun visi KPU Provinsi Gorontalo 2015-2019 adalah Menjadi Penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil. Penjabaran visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Provinsi Gorontalo untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan

mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga



menjadikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional nawa cita, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan

terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.



2. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015 – 2019 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabilitas, serta aksesibel
- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme Penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara pemilu
- c. Menjalankan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku

- kepentingan;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

3. Tujuan KPU Provinsi Gorontalo

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang



hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU Provinsi Gorontalo yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel; dan
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya Provinsi Gorontalo.

4. Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo

Sebagai wujud dari bentuk akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Gorontalo dalam

melaksanakan tugas dan

kewenangan yang

diberikan oleh Undang-

Undang, maka Indikator

Kinerja Utama KPU

Provinsi Gorontalo

sesuai Indikator Kinerja



KPU RI sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 74.a/HK.03-

Kpts/Prov/VI/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi

Gorontalo Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Gorontalo. Adapun indikator kinerja utama sebagaimana berikut:

- 1) Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
- 2) Persentase partisipasi pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan
- 3) Persentase partisipasi pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan
- 4) Persentase partisipasi pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan

- 5) Persentase pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya
- 6) Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik
- 7) Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan
- 8) Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU
- 9) Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo
- 10) Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo

5. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai kurun waktu 2015-2019 adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan Sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP).



Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang demokratis:
 - a. Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu / Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu / Pemilihan;
 - d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu / Pemilihan;
 - e. Persentase pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
2. Meningkatnya Pemilu / Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Aman, Damai, Jujur dan Adil dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase KPU Provinsi Gorontalo, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan, dengan indikator:
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo;
 - b. Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo.

B. RENCANA KINERJA KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018

Setiap tahun anggaran telah disusun dalam rencana kerja tahunan KPU, KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota dalam satu kesatuan yang tersistematikan dan sinkron dengan RKT KPU RI Tahun 2018. Oleh karena itu dalam perencanaan kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2018 mempunyai Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana tabel dibawah ini:



Tabel 2.1

Rencana Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahunan 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Demokratis	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%
2	Meningkatnya Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik
		Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik

C. PERJANJIAN KINERJA KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018

Dalam rangka mengaktualisasikan rencana kerja tahunan telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja KPU Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2018, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Demokratis	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%
2	Meningkatnya Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Gorontalo	86%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik
		Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik

	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Rp. 11.143.365.000,-
2.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 4.478.908.000,-

Bahwa dalam perjanjian kinerja KPU Provinsi Gorontalo terdapat perubahan revisi penambahan anggaran sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Revisi Pagu Anggaran KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN DIPA	PAGU AWAL	PAGU REVISI	SELISIH (+/-)	KETERANGAN
1	DIPA AWAL	15.622.273.000	-	-	Pagu Awal DIPA APBN T.A 2017
2	DIPA REVISI 1	15.622.273.000	15.622.273.000	-	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
3	DIPA REVISI 2	15.622.273.000	15.715.325.000	93.052.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
4	DIPA REVISI 3	15.715.325.000	16.674.180.000	958.855.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
5	DIPA REVISI 4	16.674.180.000	17.489.352.000	815.172.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pada tahun anggaran 2018 KPU Provinsi Gorontalo telah melaksanakan program dan kegiatan serta capaian kinerja dalam menyelenggarakan aktivitas tugas tugas ke pemilu berupa tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 serta kegiatan rutin dalam menunjang tugas dan fungsi KPU Provinsi Gorontalo. Secara garis besar sasaran utama yang harus dicapai dapat digambarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). KPU Provinsi Gorontalo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan merujuk kepada Sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019.

Adapun yang menjadi capaian indikator kinerja utama (IKU) KPU Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4
Indikator Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100%
2	Persentase partisipasi pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	77,50 %	82,34 %	106 %
3	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	75 %	84,16 %	112%

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	75 %	77,15%	103%
5	Persentase Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	82.34%	137%
6	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Umum / Pemilihan tanpa Konflik	95%	95%	100%
7	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum / Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan umum / pemilihan	3%	0,48%	100%
8	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam sengketa hukum yang dimenangkan KPU	86%	100%	116%
9	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Cc	Cc
10	Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Cc	Cc

Dalam mengukur target keberhasilan indikator kinerja, KPU Provinsi Gorontalo berpedoman pada target rata rata nasional yang akan mengukur pencapaian kinerja masing-masing satuan kerja dibawah naungan KPU RI. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai satu bagian manajemen yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri serta hirarki, yang menjadi program dan kegiatan KPU RI menjadi bagian yang tak terpisahkan dari KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR RI, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk mendukung pencapaian target kinerja, KPU Provinsi Gorontalo bersama KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS yang bekerja sesuai dengan tugas, kewajiban dan kewenangan masing masing.

Selain itu untuk mengukur pencapaian kinerja dianalisis melalui perbandingan target capaian tahun sebelumnya dan kinerja pada tahun berjalan serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan ataupun penurunan kinerja dan alternative solusi yang dilakukan dalam hal permasalahan yang dihadapi. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2018 yang telah dicapai sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.5
Indikator Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
SASARAN 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Demokratis				
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
2	Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	77,50%	82,34%	106%
3	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	84,16%	112%
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	77,15%	103%
5	Persentase Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	82.34%	137%
SASARAN 2. Meningkatnya Pemilu/ Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Aman, Damai, Jujur dan Adil				
6	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	95%	100%

7	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%	0,48%	100%
8	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86%	100%	116%
SASARAN 3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan				
9	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Cukup Plus	Cukup Plus
10	Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Cukup Plus	Cukup Plus

Dari tabel diatas terdapat Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Kegiatan KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2018 yang akan diurai dalam Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Gorontalo pada Tahun 2018 dalam sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

SASARAN	1
----------------	----------

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo Yang Demokratis

Untuk mencapai target pada sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR Ri. DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, mempunyai beberapa Tahapan yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo Antara lain sebagaimana dibawah ini:

1. Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 telah dilaksanakan

tepat waktu
sesuai dengan
jadwal tahapan
dan ketentuan
yang berlaku, hal
tersebut dapat



dilihat pada proses pelaksanaan Pemilu serentak baik yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota, Dari 6 (enam) KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan jadwal dan tahapan senantiasa disupervisi dan monitoring terutama dalam hal ketepatan kerja dan jadwal tahapan Pemilu 2019.

Adapun tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilakukan pada tahun 2018 yang mendukung Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan hasil berupa kegiatan antara lain: Verifikasi partai politik peserta pemilu, partai politik yang berada



dan diverifikasi oleh KPU Provinsi Gorontalo berjumlah 16 partai yang berhak mengikuti Pemilu di Provinsi Gorontalo tahun 2019, yang telah mengikuti proses administrasi dan verifikasi faktual yang telah ditetapkan oleh KPU RI.

Kegiatan lainnya adalah Penataan dan Penetapan daerah Pemilihan Pemilu yang menghasilkan 6 (enam) dapil. Ditambah dengan kegiatan Calon anggota DPRD Provinsi terseleksi Pemilu,



Selain itu memproses dari awal tahapan sampai penetapan oleh KPU Provinsi Gorontalo Calon Anggota DPD terseleksi Pemilu, memfasilitasi Kampanye Pemilu Calon anggota DPR, DPD dan DPRD yang kesemua tahapan tersebut dilakukan Supervisi/monitoring dan bimbingan teknis.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahapan Pemilu tepat waktu dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.6 Pengukuran kinerja terhadap Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
					Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100	100	100	100	100

Indikator ini sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 berjalan sesuai dengan target capaian, karena setiap tahapan pemilu harus sesuai dengan jadwal tahapan yang tidak boleh dimajukan atau mengalami penundaan tanpa ada kendala dan permasalahan ataupun rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu, untuk menganalisa keberhasilan indikator ini, ada 5 (lima) tahapan krusial yang menjadi indikator ketepatan jadwal tahapan, yaitu tahapan pemutakhiran, tahapan pencalonan, tahapan kampanye, pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara, setiap tahapan krusial ini diberi bobot 20 persen. Kesimpulan dari evaluasi dari indikator ini kelima tahapan berjalan sesuai jadwal tahapan sehingga tidak ada temuan dan laporan terkait keterlambatan jadwal tahapan.

2. Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan

Meningkatnya persentase partisipasi pemilih dalam pemilu / pemilihan dalam wilayah Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dari target nasional 77,50 persen dalam rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2015-2019. Penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2015 dari target yang ditetapkan, Sejak Pemilihan untuk 3 (tiga) Kabupaten (Kab. Pohuwato, Kab. Gorontalo dan Kab. Bone Bolango) tingkat partisipasi pemilihnya mencapai 80,01 persen, sedangkan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Pemilihan Serentak Tahun 2017 tingkat partisipasi pemilih mencapai 81,34 %,

Pada tahun 2018 pelaksanaan Pemilihan serentak pada 2 (dua) daerah yaitu Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo tingkat partisipasi pemilih mencapai 82,34 persen dari total daftar pemilih tetap Kabupaten Gorontalo Utara yang berjumlah 83.987 orang dan untuk kota Gorontalo 129.899 orang dengan total DPT dua Kabupaten/Kota berjumlah 213.886 orang, sedangkan yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan serentak 2018 berjumlah 72.328 orang di Kabupaten Gorontalo Utara dan untuk Kota Gorontalo 103.792 orang dengan total pengguna hak pilih 176.120,

Tabel 2.7
Partisipasi Pemilu dan Pilkada Provinsi Gorontalo



Dari pemilu ke pemilu tingkat partisipasi pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang dapat dilihat sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.8 Pengukuran kinerja
terhadap Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu /
Pemilihan
pada tahun 2015-2019**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2		3	4	5	6	7
1	Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	80.01%	81.34%	77,50	82,34	77,50	106%

Partisipasi pemilih di Provinsi Gorontalo dipandang berhasil karena melebihi target nasional, hal ini dilakukan dengan kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dengan berbagai model yang mudah diakses dan dipahami oleh seluruh stake holder Pemilu dan Publikasi Informasi Pemilu secara intens dan fokus kepada sasaran segmen penyebaran informasi pemilu yaitu segmen perempuan, disabilitas, kelompok marginal, pemilih pemula, tokoh agama dan masyarakat.

Untuk persentase partisipasi dari pemilu ke pemilihan berikutnya, mengalami kenaikan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor faktor antara lain kesadaran masyarakat dalam mensukseskan pemilu Kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator adalah penyusunan rancangan pedoman/juknis penyelenggaraan tahapan pemilu, komisioner KPU terseleksi, penataan organisasi, pembinaa dan pengeloaan SDM seta bantuan hukum penyelesaian kasus hukum Pemilu dan Penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu/pemilihan. Sedangkan cara mengukur partisipasi pemilih dimana pengguna hak pilih dibagi daftar pemilih tetap.

3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu / Pemilihan

Pemilih perempuan menjadi perhatian tersendiri bagi KPU Provinsi Gorontalo, yang dituangkan dalam rencana strategis. dalam rencana pembangunan nasional jangka menengah partisipasi pemilih perempuan ditargetkan sebesar 75 % pada tahun 2015 partisipasi pemilih perempuan pada pelaksanaan Pilkada serentak di 3 (tiga) daerah mencapai 81,37 % dengan jumlah pemilih perempuan sebesar 246.331 pemilih. Sedangkan pada

Pemilihan serentak Tahun 2017 untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo tingkat partisipasi



Pemilih perempuan mencapai 82,81 %.

Dari segi penyelenggara adhoc Pemilu (PPK/PPS) sebagian besar diisi perempuan. Untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo tahun 2018 pemilih perempuan Gorontalo Utara 41.626 orang dan untuk Kota Gorontalo 67.113 orang dengan total DPT perempuan dua Kabupaten/Kota berjumlah 108.739 orang sedangkan daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan di Gorontalo Utara 36.354 orang dan untuk Kota Gorontalo 55.156 orang dengan total pengguna hak pilih perempuan 91.510 orang sehingga

capaian partisipasi pemilih perempuan menggunakan hak pilih dengan capaian 84.16%

Adapun perbandingan capaian realisasi partisipasi pemilih perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu / Pemilihan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.9 Pengukuran kinerja Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2		3	4	5	6	7
1	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	81.37	82,81	75	84,16	75	112

Partisipasi pemilih perempuan di Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh regulasi yang memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan, kepengurusan partai politik dan bahkan penyelenggaraan pemilihan umum. selain itu kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo berupa pembentukan dan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pendidikan pemilih pemilu, yang output kegiatannya menguatkan peran partisipasi pemilih perempuan. Adapun mekanisme pengukuran indikator partisipasi pemilih perempuan yaitu, pengguna hak pilih perempuan dibagi pemilih perempuan dalam DPT

4. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo Dalam Pemilu / Pemilihan

Pemilih berkebutuhan khusus yang dijamin haknya sebagai warga negara berpartisipasi dalam pemilu / pemilihan. Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Tahun 2015 sebanyak 460 pemilih berpartisipasi dari 573 pemilih disabilitas atau sebesar 80,28 %, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 pemilih disabilitas tingkat partisipasinya hanya 32,69 persen, sedangkan pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo jumlah disabilitas 569 ,pemilih berpartisipasi sebanyak 439 orang dengan persentase 77.15 % kondisi ini menunjukkan kenaikan tingkat partisipasi pemilih disabilitas dibanding tahun 2017. Sedangkan cara mengukur indikator ini dengan pemilih disabilitas dibagi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih.

Tabel 2.10 Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo Dalam Pemilihan serentak 2018 Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo

DATA PEMILIH DISABILITAS KPU PROVINSI GORONTALO/ PENYANDANG CACAT	KAB.GORONTALO UTARA	KOTA GORONTALO	JUMLAH AKHIR
1	4	7	8
Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat KPU Provinsi Gorontalo	267	302	569
Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat KPU Provinsi Gorontalo yang menggunakan hak pilih	204	235	439

Adapun perbandingan pengukuran kinerja terhadap capaian persentase partisipasi pemilih disabilitas KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.11 Pengukuran kinerja Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu / Pemilihan pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Partisipasi Pemilih disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	80.28	32,69	75	77,15	75	103



Dalam melaksanakan target indikator kinerja KPU Provinsi Gorontalo didukung oleh kegiatan pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana yang berkaitan dengan kepemiluan kepada masyarakat. Dalam hal pemberian informasi pemilih disabilitas merupakan salah satu segmen yang harus mendapat perhatian khusus, agar mereka dapat memahami dan mampu berpartisipasi dalam pemilu / pemilihan. Disamping itu juga KPU Provinsi

Gorontalo melakukan penataan rumah pintar pemilu yang di dalamnya terdapat informasi pemilu bagi siapa saja yang membutuhkan informasi.

5. Persentase Pemilih KPU Provinsi Gorontalo Yang Terdaftar Dalam DPT Yang Menggunakan Hak Pilihnya

Dalam menjamin hak memilih setiap warga negara, KPU telah mengatur khusus bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang memenuhi syarat

untuk menggunakan hak pilihnya yaitu dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan (suket). Masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya



dengan mencoblos di TPS sesuai alamat KTP -el atau yang tercantum dalam KTP-el.

Adapun pengukuran capaian kinerja terhadap target sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.12 Pengukuran kinerja terhadap Persentase Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak dalam daftar pemilih Pada Pemilu / Pemilihan pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pemilih KPU Provinsi Gorontalo Yang Terdaftar Dalam DPT Yang Menggunakan Hak Pilihnya	-	-	60 %	82.34%	80%	137

Persentase ini sudah melewati target rata-rata nasional sebesar 60 persen, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya bahwa pemilih yang telah terdaftar sudah mengetahui pasti, di TPS mana dia terdaftar sehingga pemilih tersebut memilih di TPS yang berada di desa/kelurahannya,.

KPU Provinsi Gorontalo senantiasa bekerja keras agar seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dimana setiap tahunnya KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan secara rutin tanpa harus menunggu tahapan pemutakhiran pada setiap pemilu/pemilihan.

Adapuh daftar pemilih tetap pada pemilihan tahun 2018 di 2 daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo dan pengguna hak pilih Persentase pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang

menggunakan hak pilihnya pada pemilu Gorontalo Utara dan Pemilukada Kota Gorontalo Pada tahun 2018 pelaksanaan Pemilihan serentak pada 2 (dua) daerah yaitu Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo tingkat partipasi pemilih mencapai 82, 34 persen dari total daftar pemilih tetap Kabupaten Gorontalo Utara yang berjumlah 83.987 orang dan untuk kota Gorontalo 129.899 orang dengan total DPT dua Kabupaten/Kota berjumlah 213.886 orang, sedangkan yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan serentak 2018 berjumlah 72.328 orang di Kabupaten Gorontalo Utara dan untuk Kota Gorontalo 103.792 orang dengan total pengguna hak pilih 176.120, Cara pengukuran indikator ini adalah pengguna hak pilih dibagi daftar pemilih tetap laki-laki dan perempuan

SASARAN

2

Meningkatnya Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo Yang Aman, Damai, Jujur Dan Adil

Sasaran Strategis terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil merupakan unsur terpenting dari pelaksanaan Pemilu/Pemilihan, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai aturan perundang-undangan maka banyak tuntutan dari peserta Pemilu yang akan mengarah pada konflik,



maka dengan sendirinya pelaksanaan Pemilu tidak akan berjalan aman dan lancar. Oleh sebab itu, faktor kejujuran dan keadilan bagi penyelenggaraan pemilu merupakan faktor utama sebuah keberhasilan pelaksanaan pemilu/pemilihan. Adapun indikator kinerja yang mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini adalah

1. Persentase KPU Provinsi Gorontalo, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik

Setiap penyelenggaraan pemilu / pemilihan tidak menginginkan konflik baik vertikal maupun horisontal, namun ada kalanya disetiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan terjadi gesekan yang menyebabkan terjadinya konflik yang dikarenakan ketidakpuasan atau tidak menerima hasil kekalahan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atau peserta pemilu baik partai politik maupun calon perseorangan. Untuk meminimalisir konflik yang akan

terjadi maka ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo dan jajaran sampai ke tingkat PPS pada tahun 2018, melakukan beberapa kegiatan antara lain: dengan memperkuat



regulasi berupa penyusunan rancangan pedoman/juknis penyelenggaraan tahapan pemilu.

Pada tahun 2018 upaya yang dilakukan KPU Provinsi Gorontalo dalam mensupervisi dan monitoring penguatan di bidang hukum khususnya pendampingan penyusunan regulasi, sehingga pada tahun 2018 di Pilkada 2 daerah tersebut ada beberapa gugatan namun gugatan tersebut dimenangkan oleh KPU Kota Gorontalo sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara tidak ada gugatan proses maupun hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara. hal tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.14 Pengukuran Kinerja

Persentase KPU Provinsi Gorontalo, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2		3	4	5	6	7
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik	100	95	95	95	95	100

Dari tabel diatas bahwa selang tahun 2018 konflik antara penyelenggara Pemilu dengan bakal pasangan calon pada Pilkada di Kota Gorontalo, sedangkan untuk KPU Provinsi Gorontalo Terdapat 2 (dua) kasus yang digugat satu kasus pencalonan anggota DPRD Provinsi Gorontalo

2. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu / Pemilihan

Penurunan persentase dari pelaksanaan Pemilu/Pemilihan ke pemilihan berikutnya semakin turun dalam persentase penyelenggara

pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran, hal ini dipengaruhi meningkatnya pengawasan melalui pendekatan persuasif dan penindakan langsung kepada penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran. Pencegahan sejak dini terhadap penyelenggara yang melakukan pelanggaran merupakan salah satu strategi yang diupayakan oleh KPU Provinsi Gorontalo dalam rangka memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemilu / pemilihan secara jujur, adil dan demokratis pada setiap tahapan.

Penyelenggara pemilu mulai dari KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS apabila melakukan pelanggaran akan diberikan putusan pada sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada pemilu 2014, 2015 dan 2016 jumlah penyelenggara pemilu dari tingkat KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat berjumlah 293 orang. Pada tahun 2014 yang dikenai pemberhentian kode etik oleh DKPP RI berjumlah 5 orang, sedangkan tahun 2015 tidak ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Dari tahun ketahun dapat dicermati meningkatnya kasus pelanggaran kode etik sebagaimana tabel dibawah ini

**Tabel 2.15 Pengukuran Kinerja
Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti
melakukan pelanggaran Pemilu / Pemilihan pada tahun 2015-2019**

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu / Pemilihan	0%	0,01%	3%	0,48%	3%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pemilu 2015 tidak ada sanksi pelanggaran kode etik yang diberikan kepada penyelenggara pemilu. Untuk pemilihan tahun 2017 persentase penyelenggara pemilu terbukti melakukan pelanggaran sebesar 0,01 % atau hanya 1 orang penyelenggara dari jumlah penyelenggara di Provinsi Gorontalo sebanyak 19.604 orang. Sedangkan pada tahun 2018 penyelenggara pemilu sebesar 2.453 dengan persentase 0.48 atau ada 12 orang anggota KPU kabupaten yang dilaporkan ke DKPP hasil putusan 1 orang diberhentikan, 5 orang diberikan teguran dan 6 orang masih menunggu hasil putusan dari DKPP. Kegiatan yang berkenaan dengan indikator ini berupa komisioner KPU terseleksi, penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM, dimana kegiatan memberikan penguatan kelembagaan organisasi terhadap SDM anggota KPU maupun sekretariat KPU yang memfasilitas tugas dan kewenangan penyelenggaraan pemilu.

3. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Setiap pemilihan ada rasa ketidakpuasan oleh pasangan calon maupun partai politik pendukung yang kalah dalam pemilihan, salah satu solusi yang diberikan oleh konstitusi adalah penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi yang dapat digugat / diajukan oleh pasangan calon atau pendukung karena keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Gorontalo dan KPU kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo. Pada Pilkada serentak 2015 dan tahapan pilkada 2017 KPU se-Provinsi Gorontalo menerima gugatan dari partai politik, calon legislatif dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dan Bupati dan

Wakil Bupati Boeemo tahun 2017. Untuk tahun 2018 ada beberapa gugatan yang ditujukan ke penyelenggara pemilu hanya pada Penyelenggaraan Pemilihan serentak pada Kota Gorontalo, untuk lebih jelasnya sebagaimana rincian tabel dibawah ini:



Tabel 2.16 Jumlah Kasus Yang Dimenangkan Oleh KPU Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Se – Provinsi Gorontalo Tahun 2015 - 2018

NO	KAB/KOTA	2015		2016		2017		2018	
		JML KASUS	YANG DIMENANGKAN	JML KASUS	YANG DIMENANGKAN	JML KASUS	YANG DIMENANGKAN	JML KASUS	YANG DIMENANGKAN
1	Kab. Gorontalo	1	1	1	1				
2	Kab. Boalemo			2	1				
3	Kab. Pohuwato	1		1	1				
4	Kab. Bone Bolango	2		1	1				
5	Kab. Gorontalo Utara								
6	Kota Gorontalo							1	1
7	Provinsi Gorontalo			5	5	1	1		
	JUMLAH	4	1	10	9	1	1	1	1

Untuk gugatan pilkada serentak 2015 dari 4 gugatan di 3 daerah yang melaksanakan pilkada hanya 1 gugatan yang dimenangkan dan pada tahun 2016 10 gugatan 9 yang dimenangkan oleh KPU se-Provinsi Gorontalo.

Pada Tahun 2017 KPU Provinsi Gorontalo menerima gugatan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan sebanyak 1 gugatan di Mahkamah konstitusi dan dimenangkan oleh KPU Provinsi Gorontalo, sedangkan pada pemilu 2019 yang tahapan Pemilu di tahun 2018 tidak ada gugatan terhadap KPU Provinsi Gorontalo, namun pada pilkada 2018 di Kota Gorontalo hanya satu perkara akan tetapi melakukan banding pada jenjang peradilan mulai dari Bawaslu Provinsi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung, gugatan yang dimenangkan, satu kali menang di Mahkamah Agung, untuk gugatan di Mahkamah Konstitusi hasil sengketa pemilu dimenangkan KPU Kota Gorontalo

Adapun persentase gugatan yang dimenangkan KPU se-Provinsi Gorontalo sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.17 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	60	100	86	100	86	116

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa untuk pilkada serentak 2015 mengalami penurunan persentase dari yang ditargetkan, sedangkan untuk Tahapan Pilkada 2017 di tahun 2016 mencapai target kemenangan terhadap gugatan pasangan calon.

Untuk KPU Provinsi Gorontalo dari tahun 2015 sampai dengan 2018 keseluruhan gugatan yang diajukan dapat dimenangkan oleh KPU Provinsi Gorontalo sedangkan pada tahun 2018, dua gugatan yang diajukan ke Bawaslu Provinsi Gorontalo satu kasus dimenangkan oleh KPU Provinsi Gorontalo yaitu pencalonan DPD (Ikbal Makmur) tidak dikabulkan dan satu kasus tidak dimenangkan gugatan Partai Persatuan Indonesia dikabulkan oleh Bawaslu

Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu / Pemilihan

Salah satu upaya mensukseskan tugas penyelenggaraan Pemilu adalah dengan berupaya memberikan penguatan kapasitas penyelenggara pemilu/pemilihan senantiasa dilakukan dengan berbagai kegiatan melalui bimbingan teknis, rapat evaluasi maupun penguatan internal penyelenggara baik di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo sampai pada tingkat penyelenggara adhoc. Hal ini dilakukan demi untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan agar pelaksanaan pemilu / pemilihan benar-benar berkualitas dan mendapatkan hasil sesuai target yang diharapkan.

Penguatan

kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu merupakan faktor utama terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan pemilu, karena yang diberikan



penguatan berupa sistem kerja dan SDM yang bekerja dalam penyelenggara pemilu, apabila sistem berjalan dengan baik maka berganti aparatur tetap menjalankan tugas dan kewenangan dalam kelembagaan penyelenggara pemilu

Dalam menunjang tercapainya sasaran strategis KPU Provinsi Gorontalo diatas dilakukan dengan 2 (dua) Indikator kinerja dalam mewujudkan peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu / pemilihan yaitu:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo

Sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan, KPU Provinsi Gorontalo mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja dengan pencapaian yang ditargetkan setiap tahunnya dilaporkan dan dievaluasi oleh instansi di atasnya secara internal dan secara eksternal oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo dievaluasi oleh inspektorat KPU RI dan untuk KPU Kabupaten/Kota dievaluasi oleh KPU Provinsi Gorontalo, akan tetapi Laporan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo belum pernah dievaluasi, sehingga kepada kabupaten/kota tidak dapat dilakukan evaluasi. penyebab belum dievaluasinya laporan kinerja KPU se-Provinsi Gorontalo karena minimnya sumber daya manusia atau tenaga auditor dari inspektorat KPU RI, akan tetapi Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo melaporkan dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka menyempurnakan kinerja KPU Provinsi Gorontalo tahun 2018 ada beberapa kegiatan yang mengoptimalkan indikator nilai akuntabilitas kinerja yaitu pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi, analisis capaian kinerja, dokumen kepegawaian, fasilitasi pengadaan logistik pemilu , layanan teknologi

informasi pemilu, monitoring dan evaluasi pemilu, penyusunan anggaran pemilu, laporan pelaksanaan kegiatan, laporan persediaan (stock opname), pengelolaan barang milik negara, penyusunan aset pemilu, pengamanan tahapan pemilu, dan layanan perkantoran

Kesemuanya kegiatan tersebut sangat mendukung indikator dan sasaran strategis pada meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara pemilu

Tabel 2.18 Pengukuran Kinerja Terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
					Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	-	-	-	B	Cc	B	Cc

Dari tabel ini diterangkan bahwa belum pernah dilakukan evaluasi secara berjenjang maupun lembaga pemerintah berwenang, namun tidak menjadi kendala untuk menyampaikan laporan setiap tahunnya sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/lembaga.

2. Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo

Sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan setiap satuan kerja KPU di wilayah Indonesia dilakukan reviu atau pemeriksaan keuangan oleh Inspektorat Setjen KPU Republik Indonesia, guna pertanggungjawaban menuju pemerintahan yang baik dan transparan serta akuntabel. KPU Provinsi Gorontalo dan jajaran penyelenggara pemilu berkomitmen setiap

tahun dapat merealisasikan anggaran sebesar minimal 95 % dalam target nasional dan realisasi fisik sebesar 100 persen dengan target secara nasional opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk revidi atas laporan keuangan yang dilaporkan melalui rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan indikator penyampaian laporan tepat waktu dan capaian target realisasi masing-masing satker. Pada tahun 2018 realisasi keuangan mencapai 94,47%, hal ini belum mencapai target disebabkan anggaran yang berkenaan dengan remunerasi aparatur sipil negara sebagian tidak dapat digunakan, adapun perbandingan dari tahun ke tahun laporan keuangan KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.19 Pengukuran Kinerja Terhadap Revidi Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
					Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Revidi Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Cukup Plus	Baik	Cukup Plus

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah layanan pembinaan perbendaharaan KPU, laporan sistem akuntansi pelaporan keuangan pemilu, layanan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, layanan perkantoran, laporan hasil revidi laporan keuangan, pengelolaan keuangan, perbendaharaan, pertanggungjawaban tahapan pemilu dan pemeriksaan anggaran pemilu. Alat analisis kesuksesan laporan keuangan antara lain:

ketepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan, ketepatan laporan penyusunan laporan keuangan persemester dan teribnya administrasi keuangan perbulan.

C. Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Gorontalo

Pada tahun 2018 KPU Provinsi Gorontalo mengelola anggaran APBN yang diberikan dari KPU RI. Adapun anggaran APBN sebesar Rp. 17.489.352.000,- (tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari anggaran tersebut KPU Provinsi Gorontalo mengembalikan dana sebesar Rp. 965.916.790,- (sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)

Realisasi dari anggaran dalam DIPA KPU Provinsi Gorontalo Nomor: SP.DIPA-076.01.2.654556/2018 Tanggal 07 Desember 2017 untuk anggaran APBN murni mencapai 94,47 % sebagaimana tabel dibawah ini

**Tabel 2.20 Realisasi APBN Murni
KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018**

NO	NAMA SATKER	PAGU		REALISASI	SISA PAGU	PROSENT ASE (%)	KET
		AWAL	REVISI				
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(5/4*100)	8
1	KPU PROVINSI GORONTALO	15.622.273.000	17.489.352.000	16.523.435.210	965.916.790	94,47	APBN MURNI tahun 2018

Pengelolaan anggaran sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 Alokasi Anggaran yang diberikan oleh KPU RI melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dana hibah yang diberikan oleh

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat dilihat sebagaimana tabel perbandingan dibawah ini

Tabel 2.21 Perbandingan Pagu dan Realisasi APBN Murni dan HIBAH APBD Tahun Anggaran 2015 - 2018 KPU Provinsi Gorontalo

NO	TAHUN ANGGARAN	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	%
1	2015	APBN MURNI	Rp 9.173.930.000	Rp 7.951.618.719	86,68
2	2016	APBN MURNI	Rp 6.403.263.000	Rp 5.995.675.910	93,63
		APBN + HIBAH APBD	Rp 56.335.708.000	Rp 43.156.085.894	76,61
3	2017	APBN MURNI	Rp 7.098.808.000	Rp 6.822.519.807	96,11
		APBN + HIBAH APBD	Rp 42.573.933.000	Rp 42.297.644.061	99,35
4	2018	APBN MURNI	Rp 17.489.352.000	Rp 16.523.435.210	94,47

Upaya pencapaian yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo merupakan bentuk kesungguhan dalam mengaktualisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang bersinergi dengan KPU kabupaten/kota, badan adhoc penyelenggara Pemilu (PPK, PPS) serta didukung oleh stake holder Pemilu (Partai Politik, Pasangan Calon, Pers, LSM, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat), sehingga pelaksanaan pesta demokrasi di Provinsi Gorontalo dapat dilaksanakan secara maksimal dan anggaran dapat dimaksimalkan sesuai dengan peruntukannya. Adapun akuntabilitas keuangan sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2.22 Pengukuran Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran KPU Provinsi Gorontalo
Tahun 2018**

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGE T	REALI SASI	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Demokratis							
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	6.099.499.000	5.884.918.414	96,48
2	Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	77,50%	95,64%	123%	1.012.628.000	968.505.799	95,64
3	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	98,93%	132%	278.174.000	275.223.100	98,93
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	73,64%	98,18%	38.904.000	28.650.600	73,64
5	Persentase Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	82,34%	137%	116.586.000	116.355.551	99,80
SASARAN 2. Meningkatkan Pemilu/ Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Aman, Damai, Jujur dan Adil							
6	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	95%	100%	69.599.000	52.356.200	75,22
7	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%	0,48%	100%	2.631.308.000	2.434.091.472	92,50
8	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86 %	100%	116%	412.600.000	388.132.223	94,06
SASARAN 3. Meningkatkan Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan							
9	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Cukup Plus	Cukup Plus	2.027.519.000	1.863.098.631	91,89
10	Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Cukup Plus	Cukup Plus	4.802.535.000	4.512.103.226	93,95

JUMLAH TOTAL	17.489.352.000	16.523.435.216	94,47
---------------------	----------------	----------------	-------

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan dan output diatas rata-rata target anggaran, sedangkan untuk target fisik setiap output kegiatan mencapai 100 persen. Untuk output belanja pegawai masih terdapat sisa anggaran yang tidak dapat digunakan, karena disesuaikan dengan keberadaan aparatur sipil negara dalam hal pembayaran tunjangan kinerja dan uang lauk pauk yang bersifat fluktuatif disesuaikan dengan kehadiran pegawai.

Dalam pencapaian sasaran strategis, KPU Provinsi Gorontalo telah berkinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Target realisasi kinerja yang dicapai dari indikator ini 100%, sedangkan realisasi anggaran berjumlah 96,48 %.
2. Persentase partisipasi pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam pemilu/pemilihan kegiatan fisiknya mencapai 123%, sedangkan realisasi anggaran 95,64 persen. Khusus untuk persentase partisipasi Pemilih yang datang ke TPS mencapai 82,34 persen dari target nasional 77,50 persen.
3. Persentase partisipasi pemilih perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan dari target nasional yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 75 persen, KPU Provinsi dan Jajarannya sampai ke tingkat KPPS, mampu menaikkan persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu Gorontalo Utara dan pilkada pada Kota Gorontalo tahun 2018 sebesar 84,16

persen dengan realisasi kinerja (fisik) 132 persen, sedangkan untuk realisasi anggarannya mencapai 98,93 persen

4. Persentase partisipasi pemilih disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam pemilu/pemilihan, belum dapat dimaksimalkan hanya mencapai 73,64 persen fisik dari target nasional 75 persen dan realisasi fisiknya adalah 98.18 persen sedangkan realisasi anggaran mencapai 73,64 persen. Pengukurannya adalah disabilitas yang telah diidentifikasi (dicatat oleh PPDP) berpartisipasi dalam Pemilihan yang datang ke tempat pemungutan suara hanya sebesar 439 pemilih dari 569 pemilih disabilitas. Hal ini disebabkan dalam hal identifikasi pemilih disabilitas pada tuna rungu dan tuna wicara, petugas KPPS tidak dapat mengidentifikasi sebab tidak dapat dilihat secara jelas jenis disabilitas dimaksud, akan tetapi pemilih disabilitas tersebut datang ke TPS untuk memilih namun pencatatan pada pemilih tersebut tidak maksimal. KPU Provinsi Gorontalo telah berupaya melakukan sosialisasi melalui beberapa segmen diantaranya disabilitas dan pada tahun yang akan datang akan lebih dimaksimalkan lagi.
5. Persentase pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu Gorontalo Utara dan Pemilukada Kota Gorontalo Pada tahun 2018 pelaksanaan Pemilihan serentak pada 2 (dua) daerah yaitu Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo tingkat partisipasi pemilih mencapai 82, 34 persen dari total daftar pemilih tetap Kabupaten Gorontalo Utara yang berjumlah 83.987 orang dan untuk kota Gorontalo 129.899 orang dengan total DPT dua Kabupaten/Kota berjumlah 213.886

- orang, sedangkan yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan serentak 2018 berjumlah 72.328 orang di Kabupaten Gorontalo Utara dan untuk Kota Gorontalo 103.792 orang dengan total pengguna hak pilih 176.120,
6. Persentase KPU Provinsi Gorontalo, dan KPU Kabupaten / Kota Se-Provinsi Gorontalo yang melaksanakan pemilu / pemilihan tanpa konflik dapat dicapai realisasi fisik 95 persen, sedangkan realisasi keuangan mencapai 75,22%..
 7. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam penyelenggara pemilu/pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu/pemilihan. Untuk provinsi Gorontalo selang tahun 2018 dalam pelaksanaan Pilkada DKPP telah menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada 1 orang serta 5 orang sanksi teguran dan 6 orang masi menunggu putusan dari DKPP dari 2.453 penyelenggara atau 0,48 persen, sedangkan untuk realisasi anggaran mencapai 92,50 persen.
 8. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam sengketa hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan jajarannya pada gugatan di mahkamah konstitusi dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu dimenangkan oleh KPU Provinsi Gorontalo yang mampu menyampaikan argumentasi dan fakta-fakta hukum dalam sidang majelis. Dari target realisasi kinerjanya mencapai 116 persen atau 100 persen fisik, untuk realisasi keuangan sebesar 94 persen.
 9. Nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Gorontalo, berupa peningkatan laporan kinerja KPU Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota melalui asistensi pelaporan Kinerja setiap tahunnya, meskipun belum pernah dievaluasi oleh

inspektorat KPU RI. realisasi anggaran yang dicapai oleh KPU Provinsi Gorontalo sebesar 91,89 persen.

10. Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo. Indikator kinerja ini target yang dicapai masih cukup, atau sedang dari target baik yang ditetapkan. Sedangkan untuk realisasi keuangan mencapai 93,95 persen. masih cukup penilaian realisasi fisiknya karena SDM yang telah dilatih dalam pengelolaan keuangan telah dimutasikan dan belum maksimal.

BAB IV

PENUTUP

Setiap kementerian/lembaga yang menjalankan tugas dan kewenangan yang diamanatkan dalam undang-undang mengharuskan membuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban setiap tahunnya, yang sudah barang tentu mengacu pada perjanjian kinerja setiap instansi pada tahun berjalan. Pertanggungjawaban ini, mengarah pada rencana strategi masing-masing lembaga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat keberhasilan yang diukur dari target capaian yang telah ditetapkan, selain itu melakukan perbandingan setiap tahunnya.

Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo terurai secara sistimatis dalam laporan kinerja yang memuat sasaran strategis dan target indikator kinerja yang akan dicapai selang tahun anggaran 2018. Pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja telah digambarkan dalam realisasi anggaran dan fisik yang telah ditetapkan dalam target perjanjian kinerja Tahun 2018 yang direalisasinya dalam program dan kegiatan KPU Provinsi Gorontalo dalam rangka mencapai visi dan misi.

Untuk capaian visi dan misi telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dalam mendorong capaian dan sekaligus sebagai bahan pengukur keberhasilan yang telah dicapai sesuai target dalam satu tahun anggaran. Selain capaian selang tahun 2018, KPU Provinsi Gorontalo sukses telah melaksanakan tahapan

penyelenggaraan pemilu tahun 2019 tanpa ada kendala yang cukup signifikan, padahal, pada tahun 2018 telah mengalami pergantian komisioner yang bertugas di KPU Provinsi Gorontalo, selain itu, di Provinsi Gorontalo menyelenggarakan pemilihan serentak di Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo, yang berjalan dengan baik dan tertib. tentunya hal ini dibarengi dengan semangat dan kerja keras sehingga membuahkan hasil yang dibuktikan dengan penghargaan yang diraih pada pelaksanaan pemilu/pemilihan selang tahun 2014-2019 antara lain :

1. Memperoleh predikat pertama kualitas daftar pemilih pada Pemilu 2014 secara nasional.
2. Memperoleh predikat kedua sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu 2014.
3. Keberhasilan dalam partisipasi pemilih pada Pilkada serentak Tahun 2015 sebesar 80,01 % diatas rata-rata nasional.
4. Pada tahun 2017 mendapat penghargaan dari Bawaslu Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Pilkada 2017 terbaik.
5. Dalam hal pembinaan apartur penyelenggara pemilu mendapat terbaik satu kategori tertib administrasi dalam pelaporan penegakan disiplin dan pembinaan SDM

Penguatan sumber daya manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh upaya konsolidasi organisasi, koordinasi dan konsultasi. sehingga dapat mewujudkan profesionalitas dalam menjalankan tugas fungsi dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-undang.

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	77,50%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%
2	Meningkatnya Pemilu/ Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%
		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik
		Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik

PROGRAM

ANGGARAN

1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Rp.	11.143.365.000,-
2	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp.	4.478.908.000,-

LAMPIRAN II

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	77,50%	82,34%	106%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	84,16%	112%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	77,15%	103%
		Persentase Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	86,91%	144%
2	Meningkatnya Pemilu/ Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	95%	100%
		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%	0,48%	100%
		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86%	100%	116%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Baik	Cukup Plus	Cukup Plus
		Reviu Laporan Keuangan	Baik	Cukup Plus	Cukup Plus